

PENSASARAN PROGRAM BERDASARKAN RUMAH TANGGA DAN WILAYAH

Elan Satriawan
Ketua Pokja, TNP2K

Rapat Kerja Teknis TKPK Tahun 2015



KERANGKA MATERI

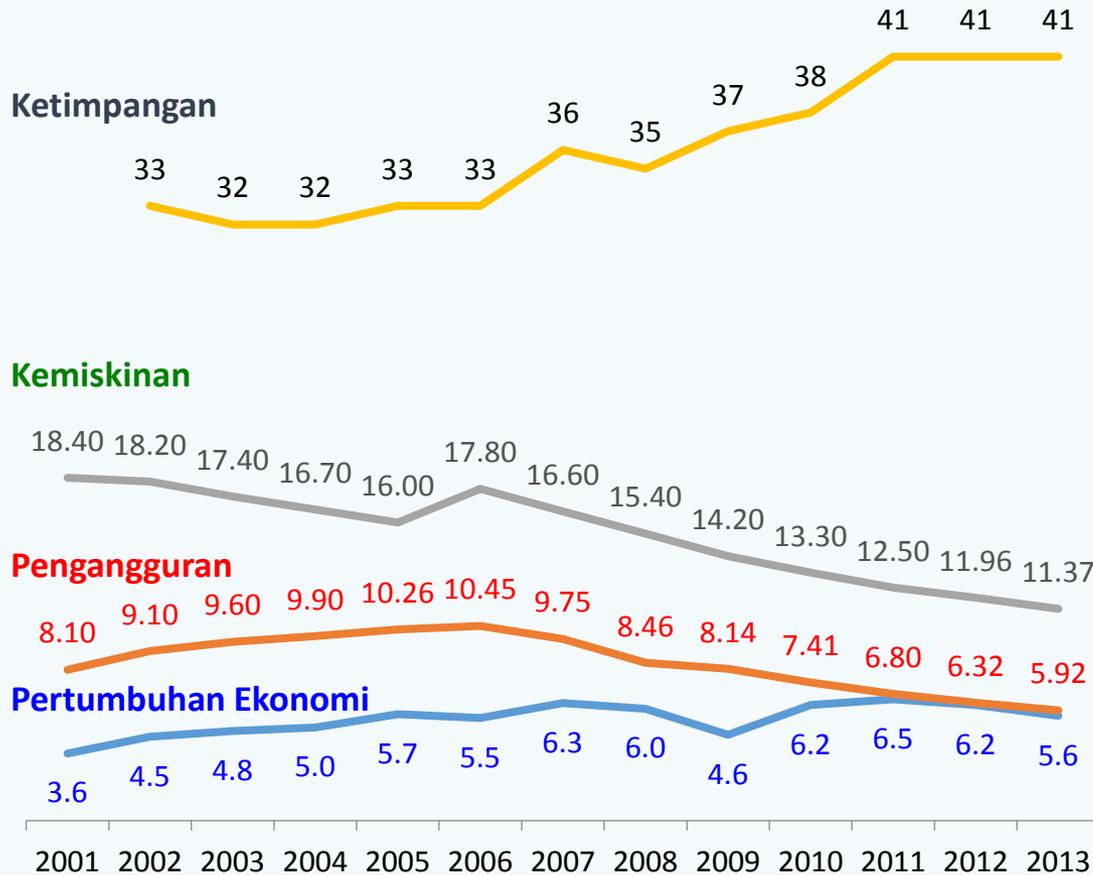
1. Situasi dan Tantangan Pembangunan Sosial di Indonesia
2. Pensasaran Rumah Tangga/Keluarga Prioritas
3. Pensasaran Wilayah Prioritas
4. Kesimpulan



SITUASI DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN SOSIAL DI INDONESIA

TANTANGAN PERLINDUNGAN SOSIAL

PENINGKATAN KETIMPANGAN & PELAMBATAN PENURUNAN KEMISKINAN

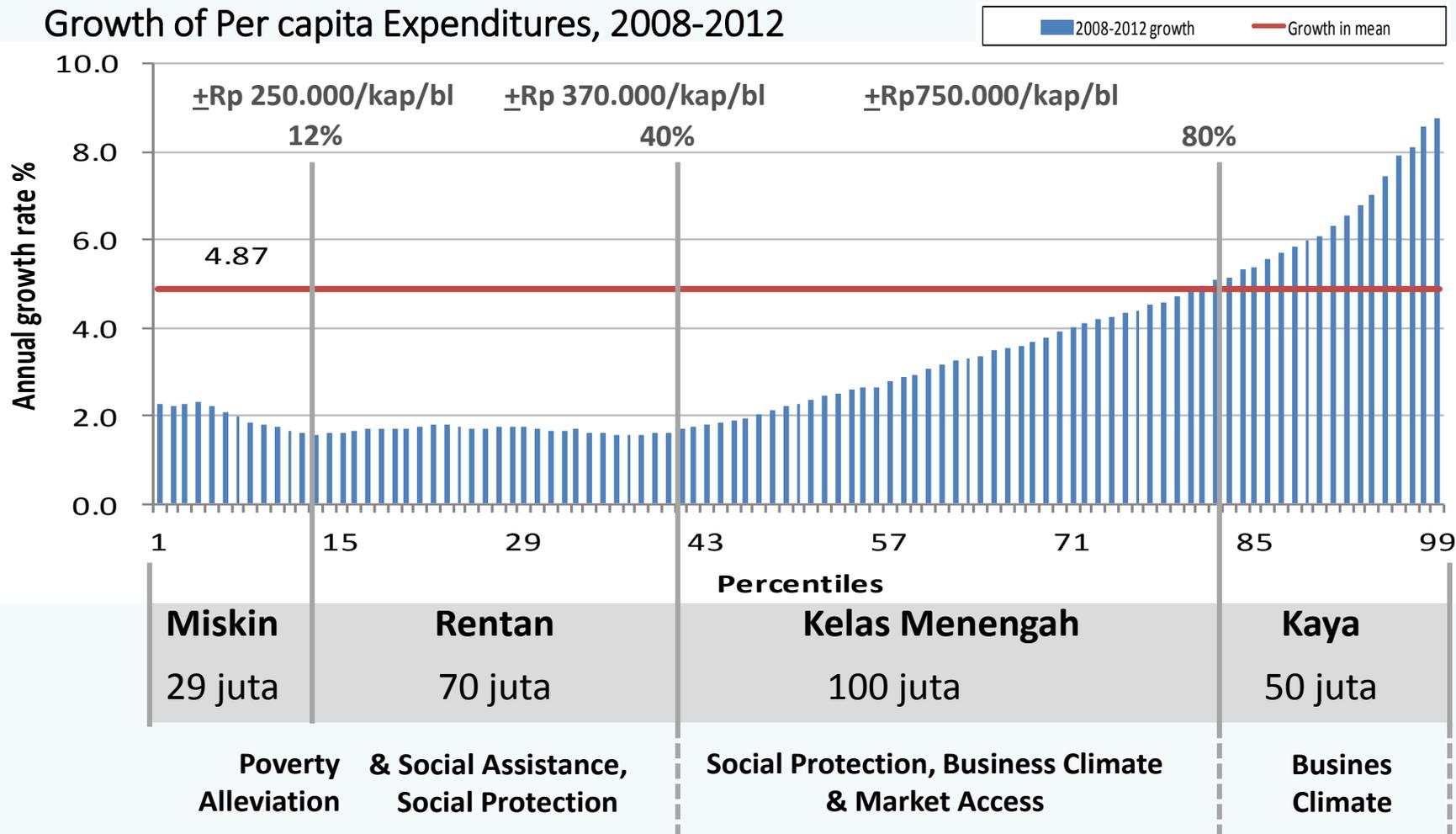


Percapita Income (USD)												
772	922	1,098	1,186	1,318	1,663	1,938	2,238	2,346	3,003	3,540	3,606	-

- Tren pertumbuhan ekonomi positif setelah krisis ekonomi 1990 dan krisis keuangan global 2008-2009
- Pengangguran juga mengalami kecenderungan penurunan mulai tahun 2006
- Tingkat kemiskinan terus mengalami penurunan walau sempat meningkat di tahun 2006
- Indeks Gini mencapai posisi tertingginya dalam kurun waktu 50 tahun terakhir

APA YANG MENJELASKAN PENINGKATAN KETIMPANGAN? PERTUMBUHAN YANG TIMPANG ANTAR KELOMPOK PENDAPATAN

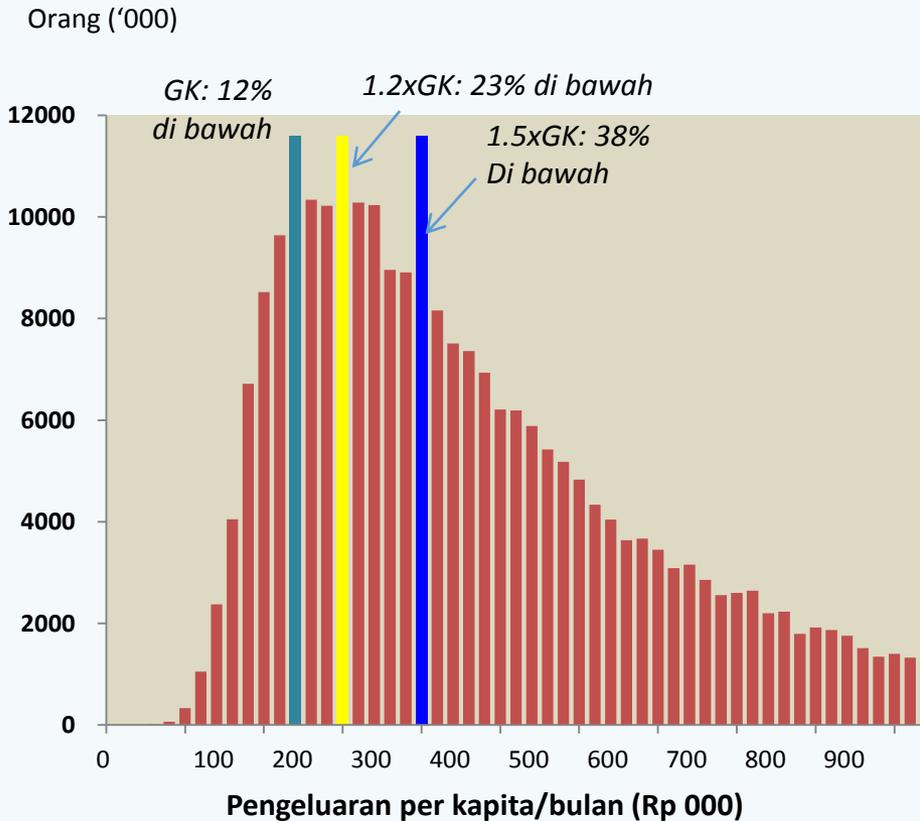
Growth of Per capita Expenditures, 2008-2012



Sumber: BPS & TNP2K

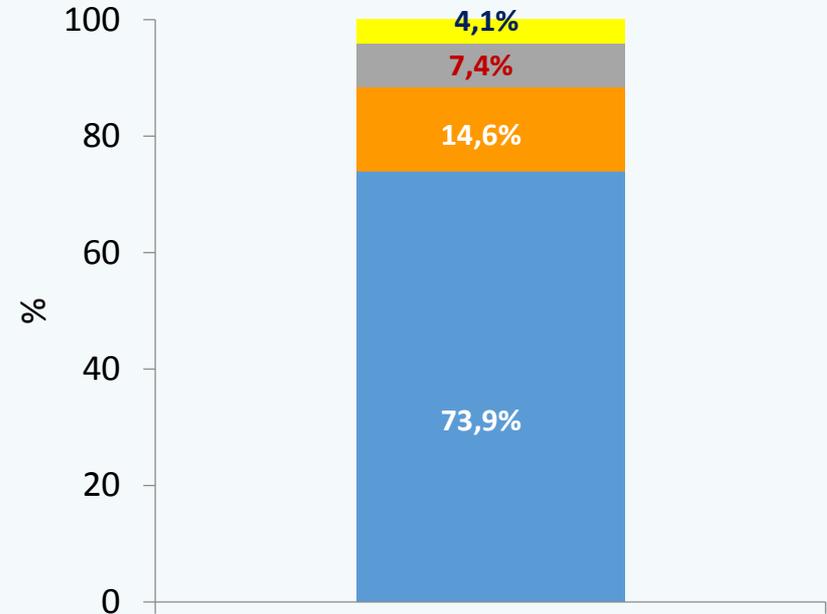
TINGKAT KERENTANAN KEMISKINAN YANG MASIH TINGGI MEREKA YANG RENTAN MUDAH KELUAR MASUK KEMISKINAN

Distribusi Pengeluaran riil/Kapita, 2012



Sumber: Susenas dan perhitungan Bank Dunia

Frekuensi RT Mengalami Kemiskinan di 2008-10

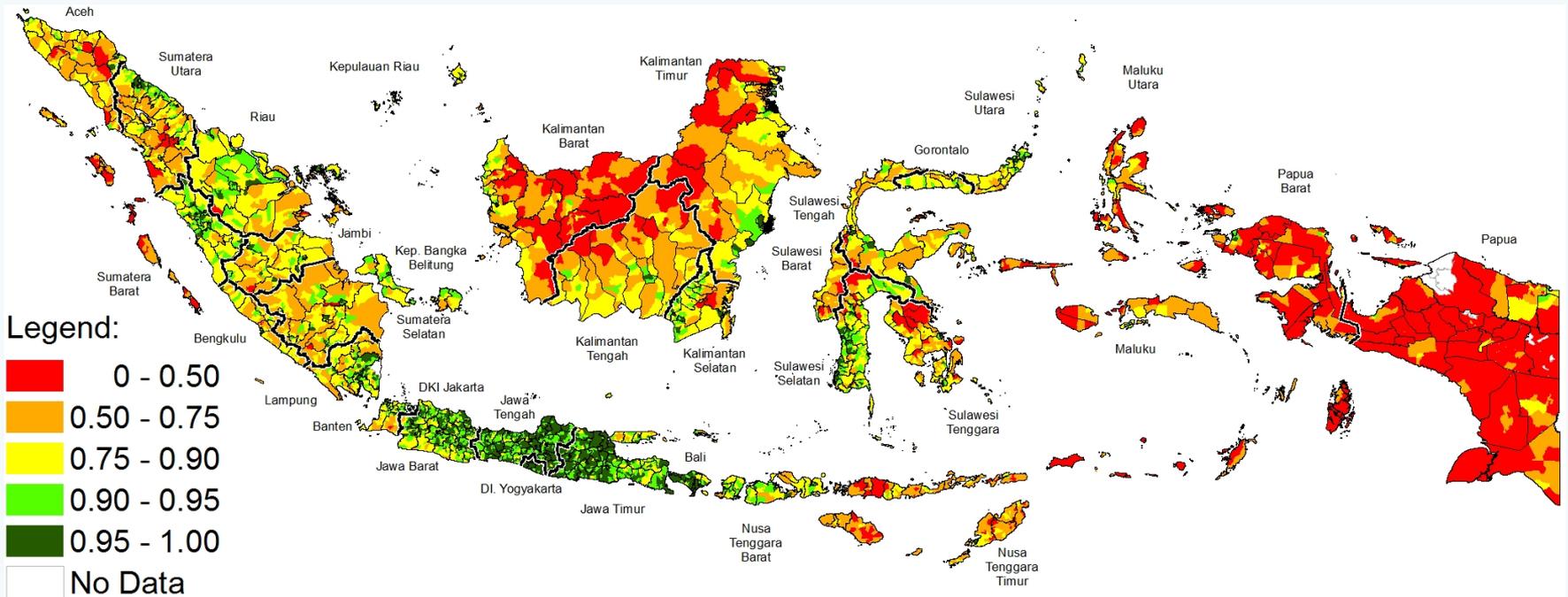


Frekuensi Pernah Miskin 2008-10

- Tidak Pernah Miskin
- Miskin Satu Kali
- Miskin Dua Kali
- Miskin Tiga Kali

Situasi Pendidikan yang Kurang Merata

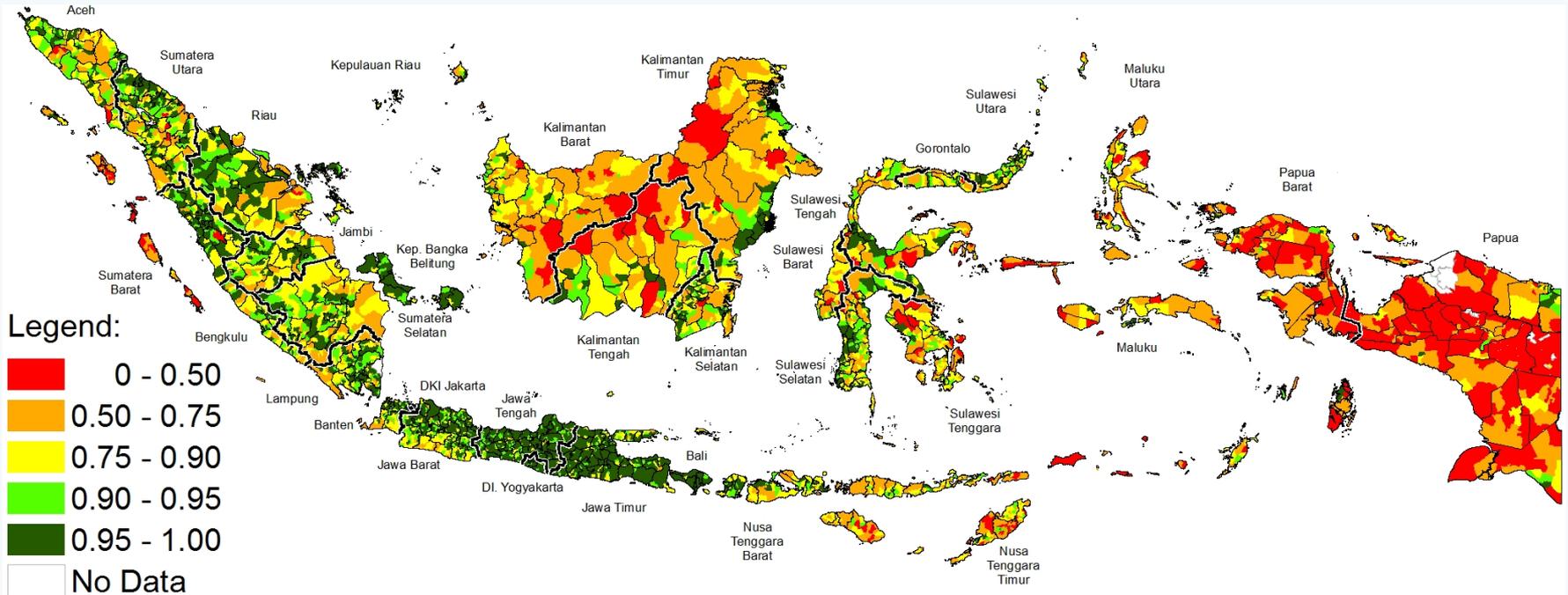
Indeks Komposit Pendidikan



- Indeks Komposit dibentuk dengan weights:
ketersediaan fasdik: 50 %, Kualifikasi guru: 20 %, karakteristik fasilitas: 30 %

Situasi Kesehatan tidak berbeda jauh....

Indeks Komposit Kesehatan



- Indeks Komposite dibentuk dengan weights:
Ketersediaan Faskes: 60 %, karakteristik faskes: 20%, ketersediaan dan karakteristik personnel: 20 %



BDT DAN PENSASARAN PROGRAM BERBASIS RUMAH TANGGA /KELUARGA/INDIVIDU

Perbedaan Data Kemiskinan Agregat (SUSENAS) dan Basis Data Terpadu (BDT)

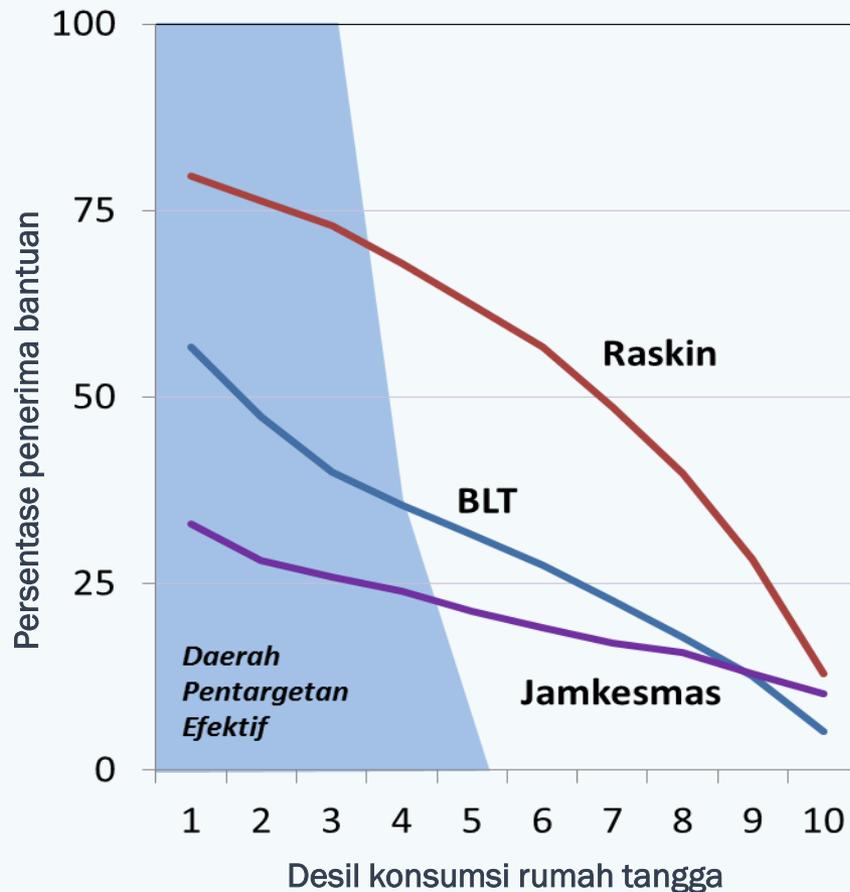
Agregat (Susenas)

- **Susenas** digunakan untuk mendapatkan **angka/tingkat kemiskinan** → proporsi jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dalam total penduduk.
- Perhitungan kemiskinan yang digunakan adalah pendekatan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*).
- Garis kemiskinan dihitung berdasarkan kebutuhan makanan dan bukan makanan.
- Dari perhitungan ini dapat didefinisikan penduduk sangat miskin (di bawah 0,8xGK), miskin (di bawah GK), dan hampir miskin (antara 1-1,2xGK).

Basis Data Terpadu

- Basis Data Terpadu/ PPLS merupakan **data mikro** yang diperoleh melalui sensus untuk memperoleh **data berdasarkan nama dan alamat** dari 40% penduduk dengan status kesejahteraan terendah dan **bukanlah basis data kemiskinan**.
- Sebagai contoh Garis Kemiskinan tahun 2011 adalah 11,9% berarti seluruh Rumah Tangga pada desil 1 atau 10% adalah masuk kelompok Rumah Tangga sangat miskin dan miskin. Sementara sebagian desil 2 atau 20% masuk kedalam kelompok rumah tangga hampir miskin.

Efektivitas Penargetan Rumah Tangga/ Individu Prioritas Program Perlindungan Sosial



Sumber: Susenas 2009

Hanya sekitar **30%** penduduk miskin yang menerima ketiga program perlindungan sosial (Raskin, BLT, Jamkesmas)



Basis Data Terpadu akan meningkatkan efektivitas penargetan

Perbaikan Metode Pengumpulan Data PPLS 2011

Tujuan: menurunkan *inclusion* dan *exclusion error*

	Miskin	Tidak miskin
Menerima bantuan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <i>Inclusion Error</i>
Tidak menerima bantuan	<input type="checkbox"/> <i>Exclusion Error</i>	<input checked="" type="checkbox"/>

Penyusunan Daftar Awal Rumah Tangga



Mekanisme Pemutakhiran Basis Data Terpadu 2015



Peran Penting Forum Konsultasi Publik (FKP) Dalam Pemutakhiran BDT



- 1 Mengakomodasi usulan masyarakat untuk menyempurnakan ketepatan sasaran BDT
- 2 Meningkatkan peran serta dan keterlibatan pemerintah daerah
- 3 Menyempurnakan ketepatan sasaran BDT melalui peningkatan cakupan pendataan dan perangkingan

Konsultasi publik telah diuji oleh TNP2K dengan hasil:

- Pemerintah daerah dan masyarakat antusias berpartisipasi
- Pemutakhiran daftar awal menjadi kunci dalam peningkatan kualitas PBDT, terutama:
 - ✓ Penjangkauan rumah tangga miskin yang belum terdaftar (*Exclusion Error*)
 - ✓ Penandaan rumah tangga kaya yang terdaftar (*Inclusion Error*)
 - ✓ Kriteria tetap dan mudah dipahami dalam usulan penambahan (*exclusion error*):
“ usulan tambahan rumah tangga diprioritaskan kepada rumah tangga miskin yang memiliki anggota rumah tangga: keterbatasan fisik/mental; berpenyakit kronis; beban ketergantungan tinggi”

Produk dan Layanan Data Basis Data Terpadu

Data Agregat/Distribusi tingkat Kecamatan

- Untuk keperluan perencanaan program
- Pengguna: pemerintah pusat maupun daerah
- Dapat diakses melalui website TNP2K
<http://bdt.tnp2k.go.id/>

Data Individu TANPA Nama & Alamat

- Untuk tujuan analisis atau perencanaan
- Pengguna: instansi pemerintah pusat dan daerah, lembaga penelitian, NGO, dll
- Dibutuhkan surat permohonan dari pengguna (+proposal penelitian bila untuk penelitian)
<http://dataterpadu@tnp2k.go.id>

Data Individu DENGAN Nama & Alamat

- Digunakan hanya untuk program-program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial
- Pengguna: kementerian/lembaga dan instansi pelaksana program, baik di pusat maupun daerah
- Dibutuhkan surat permohonan dari pengguna yang berisi deskripsi dan sasaran program + Pernyataan Integritas Penggunaan Data (untuk ikut menjaga integritas data)

Pemanfaatan dan Pengelolaan Basis Data Terpadu

Kriteria Kepesertaan
Program Perlindungan Sosial

Ditetapkan oleh K/L atau Pemerintah Daerah penyelenggara Program

Basis Data Terpadu Untuk
Program Perlindungan Sosial

Kriteria diterapkan kepada Basis Data Terpadu

Jamkesmas

Subsidi
Siswa
Miskin

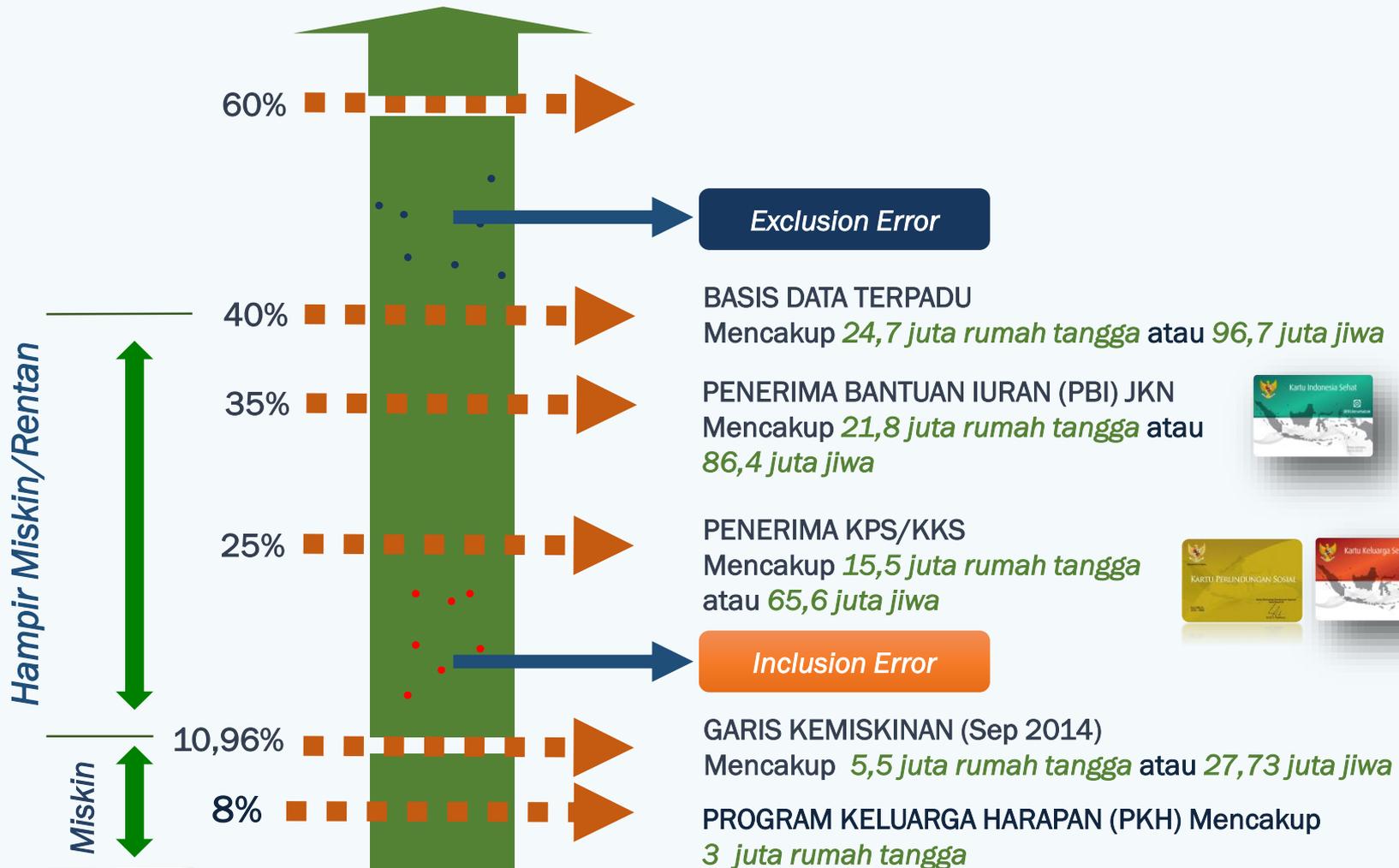
Program
Keluarga
Harapan

Raskin

*Daftar nama dan alamat individu/
keluarga/ rumah tangga **SASARAN**
masing-masing program*

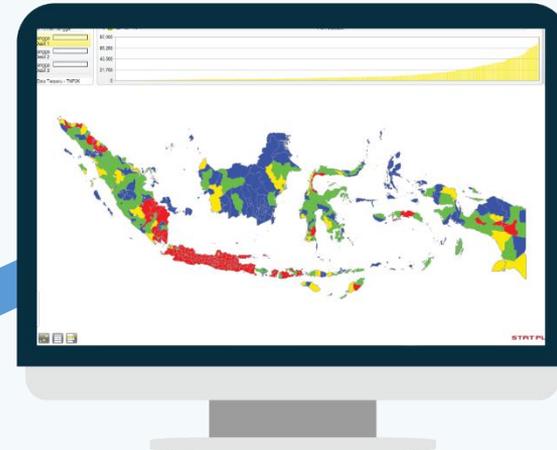
Program Perlindungan Sosial lainnya
Dengan Sasaran Individu/Keluarga/Rumah Tangga

Persentase Penduduk Dengan Karakteristik Sosial Ekonomi yang Hampir Sama

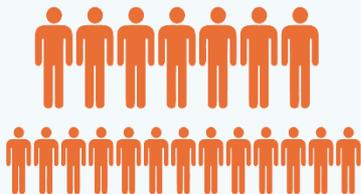


Pemanfaatan Basis Data Terpadu (BDT)

BDT merupakan bagian dari Open Government Indonesia



Daftar nama dan alamat



Masyarakat luas

56

Permintaan dari
21 Kementerian dan
Lembaga

65

Permintaan dari
31 Provinsi

513

Permintaan dari
308 Kabupaten/Kota

Data tidak untuk kepentingan politik dan komersial

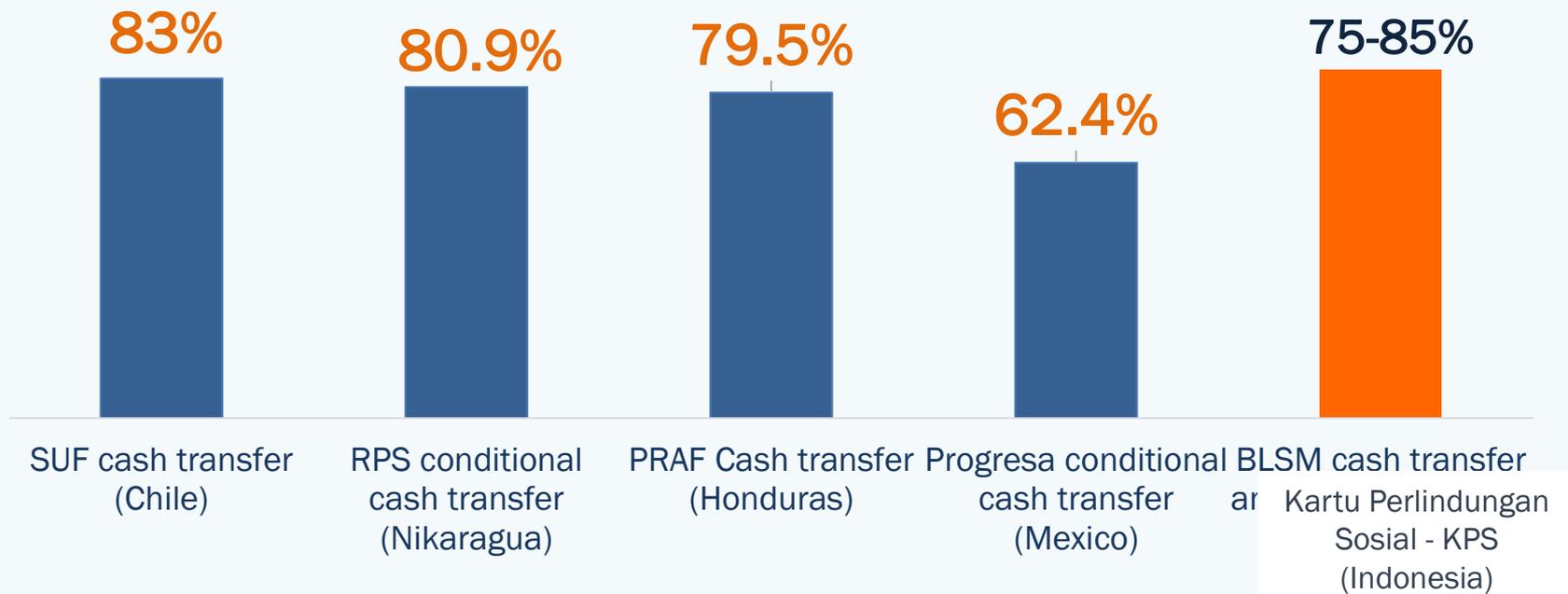
Rumah Tangga Mana yang Lebih Berhak Menerima Program?



Lebih berhak menerima KPS karena kondisi anggota keluarga lain tidak bekerja, memiliki jumlah tanggungan lebih banyak, dan kondisi pasangan tidak bekerja.

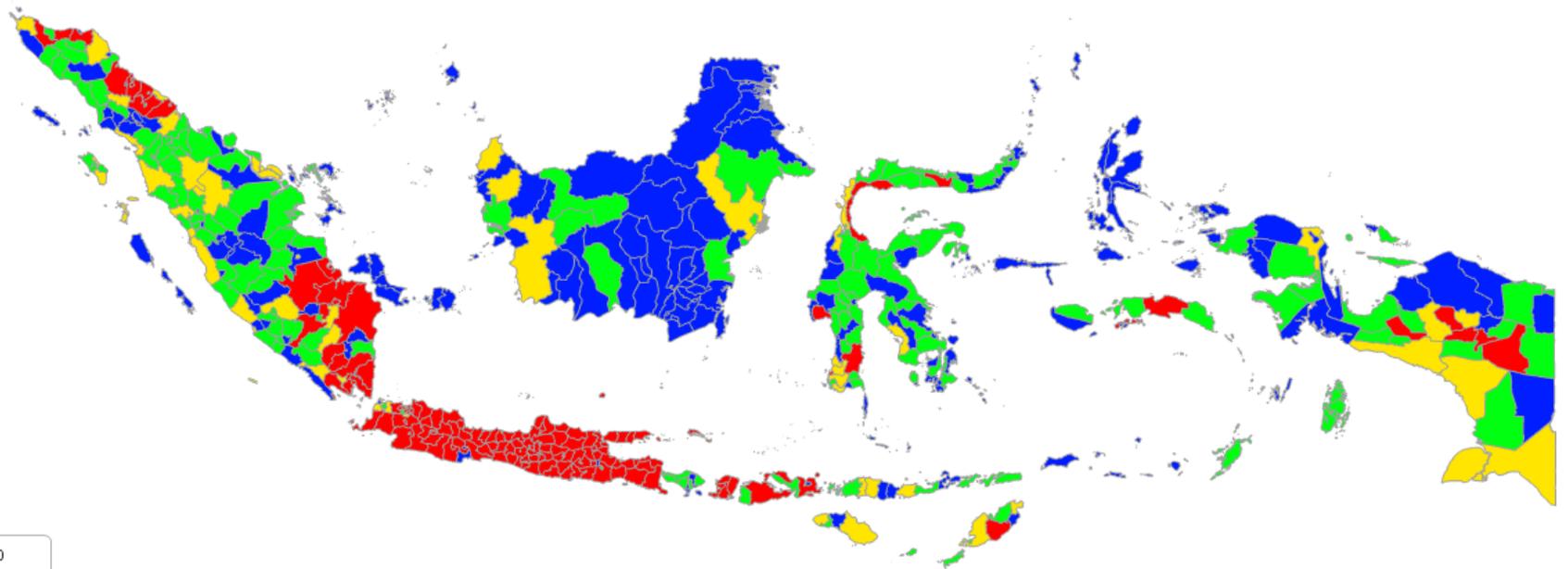
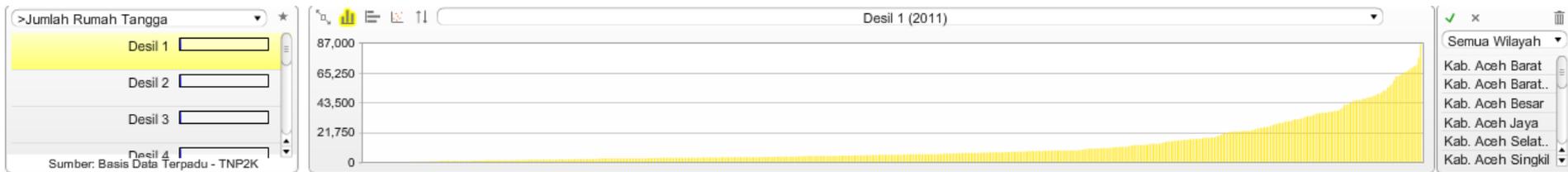
Pengalaman Internasional Terkait Dengan Tingkat Akurasi Pentargetan Rumah Tangga

Akurasi Pentargetan 40% penduduk dengan status sosial ekonomi terbawah di beberapa Negara



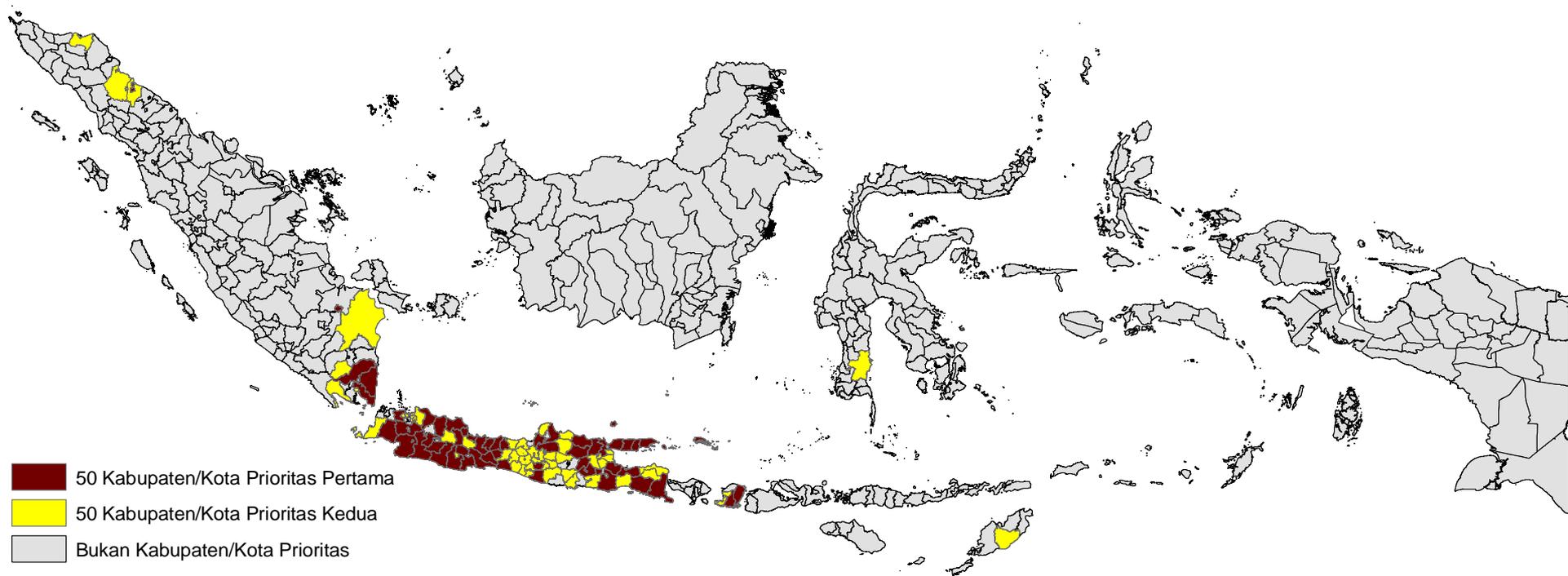
Sumber: Coady et al. 2004 & TNP2K 2014

Penargetan Prioritas Rumah Tangga Desil 1 di Indonesia



SEBARAN 100 KABUPATEN WILAYAH PRIORITYAS

Berdasarkan Jumlah 40% Penduduk dengan Kesejahteraan Terendah dalam BDT





PEMANFAATAN DATA UNTUK PENSASARAN BERBASIS WILAYAH

PENAJAMAN UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN

1. Salah satu upaya untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan adalah dengan melakukan penargetan wilayah prioritas pada kantong-kantong kemiskinan (***Geographic Targeting of Poverty Alleviation Programs***)
2. Penargetan wilayah kantong kemiskinan bukan hal baru dalam program penanggulangan kemiskinan: IDT dan PNPM.
3. Pensasaran wilayah mensasar program didasarkan atas karakteristik/kondisi suatu wilayah –misalnya menyangkut tingkat kemiskinan, akses/transportasi, jumlah faskes/fasdik, dan lainnya
4. Kriteria pemilihan kantong kemiskinan memperhatikan ciri multidimensi dari masalah kemiskinan

Bukan hanya konsumsi/pengeluaran tetapi juga karakteristik wilayah seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, perumahan dan ketenagakerjaan.

Mengapa Pensasaran Wilayah?

1. Kemiskinan yang terkonsentrasi

- Masyarakat miskin dapat terkonsentrasi dan merata tinggal dalam suatu wilayah tertentu → kriteria pensasaran jumlah/persentase orang miskin atau pemegang KKS/KPS

2. Mengatasi ketertinggalan, keterisolasian wilayah

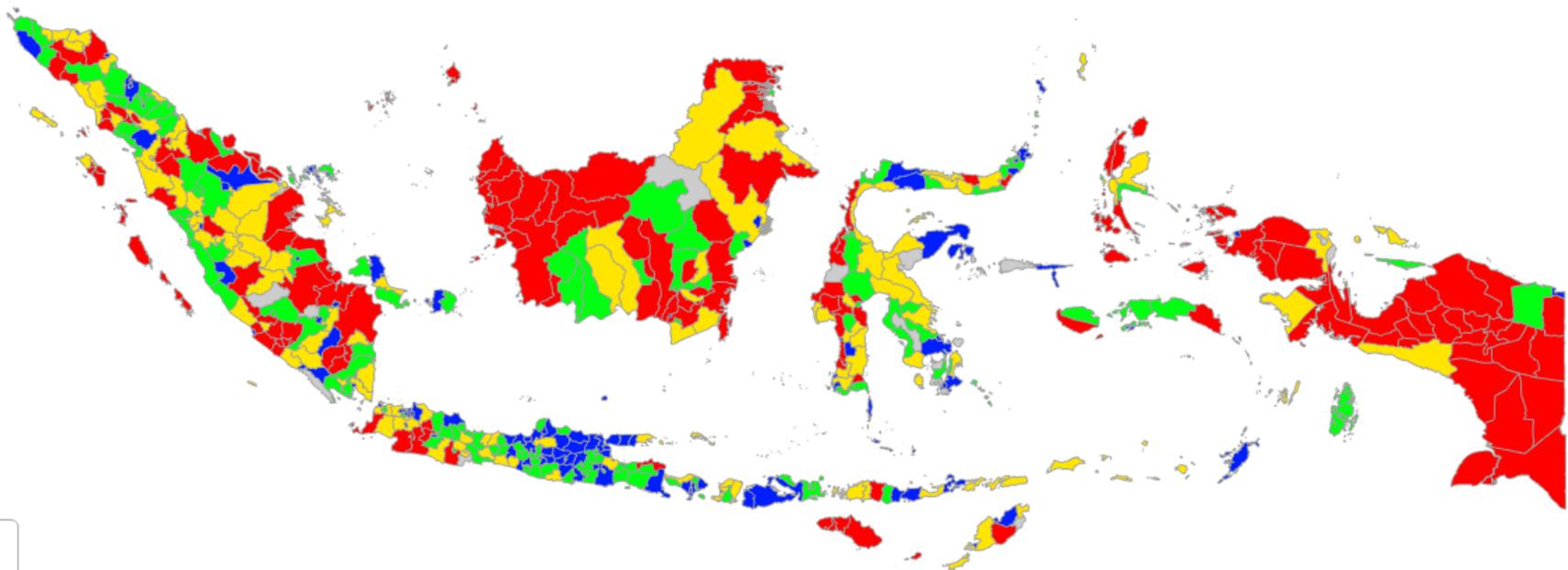
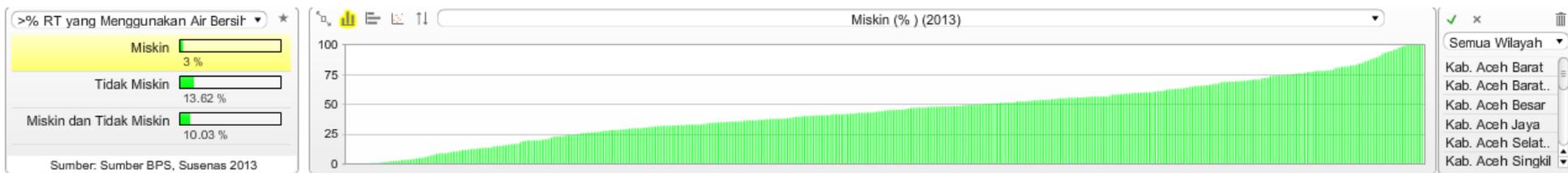
- Permasalahan kemiskinan sangat terkait dengan minimnya akses pada layanan dasar dan infrastruktur → kriteria dapat berupa ketersediaan layanan dasar/infrastruktur atau jarak untuk mencapainya

3. Mainstreaming penanggulangan kemiskinan dalam pembangunan sektoral dan wilayah

- Pembangunan sektoral atau wilayah seringkali hanya mengutamakan pertimbangan ekonomi, mainstreaming dapat dilakukan untuk makin mendorong sinergi kebijakan/program untuk penanggulangan kemiskinan

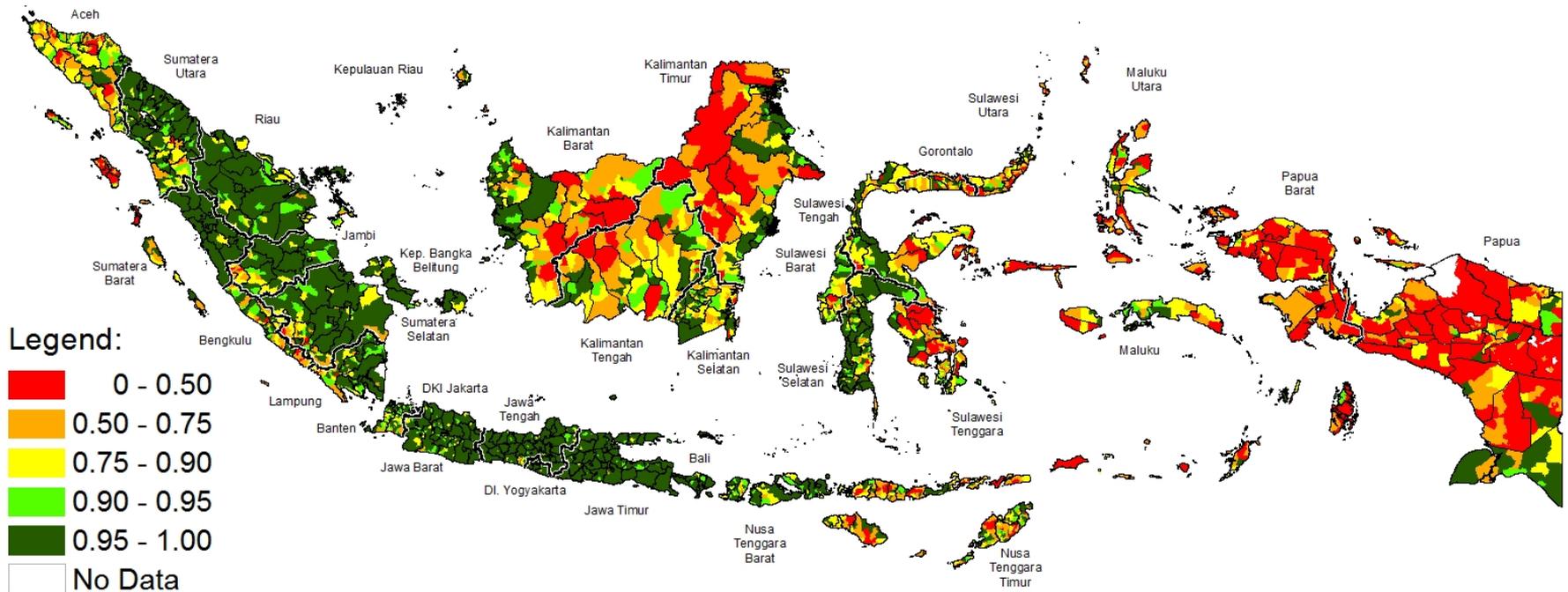
4. Ketiadaan data pensasaran berbasis rumah tangga

Penargetan Wilayah Prioritas Persentase Rumah Tangga Miskin yang Menggunakan Akses pada Air Bersih di Indonesia



Rapat Kerja Teknis TKPK Tahun 2015

Pensasaran Wilayah dengan Keberadaan Bidan



- Tingkat terendah keberadaan bidan adalah wilayah perdesaan Sulawesi Utara (61%), Maluku (54%), Kalimantan Timur (51%), Maluku Utara (50%), Papua (30%) dan Papua Barat (27%).



KESIMPULAN

1. Upaya penanggulangan kemiskinan membutuhkan sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat/swasta
2. Pensasaran program diperlukan agar program/intervensi:
 - Diterima rumah tangga/keluarga yang berhak dalam jumlah yang tepat
 - Wilayah miskin/tertinggal memperoleh intervensi/dukungan yang tepat
3. Basis Data Terpadu Bisa dan sumber data yang relevan dapat dimanfaatkan untuk (1) Mengidentifikasi sumber permasalahan kemiskinan, (2) Menentukan prioritas intervensi program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, (3) Pengalokasian anggaran untuk program penanggulangan kemiskinan daerah, dan (4) Menentukan penerima manfaat (siapa, lokasi, dll).



TERIMA KASIH